



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mukti Sulaiman, SH., M.HUM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Alex Noerdin
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 14 - 3 - 2016

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. MUKTI SULAIMAN, SH., M.HUM
Pembina Utama
NIP. 195611111980031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Manajemen Pemerintah yang Akuntabel, Transparan dan dapat diakses oleh Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel - Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Nilai Keterbukaan informasi publik Provinsi Sumatera Selatan - Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik - Persentase Informasi Bidang Perekonomian yang dapat di akses publik 	<ul style="list-style-type: none"> 80 2,8 65 11 Perda dan 37 Pergub 100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) 	<ul style="list-style-type: none"> 65,51 100%
3.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemekaran Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang difasilitasi - Persentase Kabupaten pemekaran yang telah memiliki infrastruktur sesuai standar - Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta /BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah - Persentase Luas Lahan yang Dibebaskan oleh Pemprov Sumsel untuk Kepentingan Umum - Persentase kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 12 Dokumen MoU 100% 100%
4.	Berkembangnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SKPD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan - Jumlah SKPD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 50 SKPD 30 SKPD
5.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana Yang Optimal 	<ul style="list-style-type: none"> 90%

Program,	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp 1.000.000.000	APBD
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp 470.000.000	APBD
3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp 183.622.300.000	APBD
4. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.799.000.000	APBD
5. Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 4.380.200.000	APBD
6. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI	Rp 1.069.470.000	APBD
7. Perumusan kebijakan di bidang keagamaan	Rp 3.032.900.000	APBD
8. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	Rp 93.300.000	APBD
9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan	Rp 2.700.000.000	APBD
10. Pembangunan Bidang Ekonomi	Rp 1.198.954.050	APBD
11. Kerjasama wilayah perbatasan	Rp 680.000.000	APBD
12. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp 31.813.525.000	APBD
13. Perumusan Kebijakan di Bidang HIV/AIDS dan UKS	Rp 62.230.000	APBD
14. Program Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp 53.250.000	APBD
15. Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp 38.877.007.363	APBD
16. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 30.184.743.000	APBD
17. Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 2.700.000.000	APBD
18. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp 20.000.000	APBD
19. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 501.000.000	APBD
20. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp 210.000.000	APBD
21. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp 14.876.000.000	APBD

Palembang, 14 - 3 - 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. MUKTI SULAIMAN, SH., M.HUM
Pembina Utama
NIP. 195611111980031013



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Telp/Fax (0711) 354221-350977 Palembang
Email : inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.Tanda Subagio, Ak., M.M, C.A.
Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Alex Noerdin
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

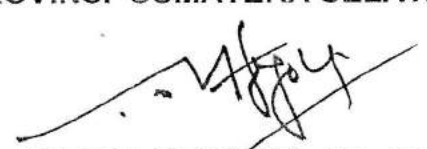
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 14 - 3 - 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. ALEX NOERDIN

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


Drs. TANDA SUBAGIO, Ak., M.M, C.A
Pembina Utama Madya
NIP. 195707171985121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1.	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	WTP dengan DPP
		2.	persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP	85%
2.	Meningkatnya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1.	Persentase SKPD dengan nilai Akuntabilitas kategori B	75%
		2.	Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,3
3.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		
		1.	Badan Pemeriksa Keuangan	88%
		2.	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	94%
		3.	Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis	73%
		4.	Inspektorat Provinsi	96%
4.	Terwujudnya Zona Integritas	1.	Persentase SKPD dengan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	6%
5.	Terwujudnya Pengendalian Internal pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1.	Persentase SKPD yang telah melakukan SPIP	12%

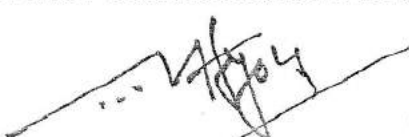
Program	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 2.768.562.000	APBD
2. Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	Rp. 307.248.000	APBD
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Rp. 36.200.000	APBD
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 282.512.000	APBD
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 297.965.000	APBD
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.550.106.000	APBD

Palembang, 14 - 3 - 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. ALEX NOERDIN

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


Drs. TANDA SUBAGIO, AK., M.M, C.A
Pembina Utama Madya
NIP. 195707171985121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018 - 321181 Fax. (0711) 314586 - 356118
Website : www.bappeda.sumselprov.go.id E-mail : info@bappeda.sumselprov.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. EKOWATI RETNANINGSIH, SKM., M.Kes
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. ALEX NOERDIN
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 14 - 3 - 2016

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

DR. EKOWATI RETNANINGSIH, SKM., M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196303121989032007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pencapaian sasaran Indikator Makro , sesuai target RPJMD	1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan	6,25 %
		2 Angka IPM Provinsi Sumatera Selatan	67,94
		3 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan	12.75%
		4 Persentase Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD	90%
		5 Persentase Pencapaian Indikator RPJMD Provinsi Sumsel	80%
2	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang tepat waktu	- Persentase Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS secara tepat waktu di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	100%
3	Meningkatnya sinkronitas perencanaan pembangunan	1 Persentase RENSTRA SKPD yang sesuai dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	80%
		2 Persentase RPJMD Kabupaten/Kota yang sinkron dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	82%
		3 Persentase RKPD Kabupaten/Kota yang sinkron dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan	50%
		4 Persentase RENJA SKPD yang sinkron dengan Renstra SKPD	100%
		5 Persentase Renja SKPD yang sinkron dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	90%
		6 Persentase penetapan kinerja SKPD yang sesuai RPJMD	90%
4	Meningkatnya kinerja SKPD	- Persentase SKPD yang berkinerja baik (lebih besar dari 70%)	80%
5	Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	- Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW di Provinsi dan Kabupaten/Kota	80%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.152.012.310,-	APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 622.000.000,-	APBD
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.173.216.975,-	APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 181.499.445,-	APBD
5 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 70.000.000,-	APBD
6 Program Pengembangan Data Informasi	Rp. 235.572.000,-	APBD
7 Program Kerjasama Pembangunan	Rp. 137.400.000,-	APBD
8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 720.138.000,-	APBD
9 Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp. 613.571.000,-	APBD
10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp. 545.013.080,-	APBD
11 Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 748.554.000,-	APBD
12 Program Pemanfaatan Tata Ruang	Rp. 60.000.000,-	APBD
13 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp. 920.491.000,-	APBN Dekonsentras Kementerian PPN/ Bappenas RI
14 Program Bina Pembangunan Daerah	Rp. 647.000.000,-	APBN Dekonsentras Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI

Palembang, 14-3-2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. ALEX NOERDIN

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


DR. EKOWATI RETNANINGSIH, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP.196303121989032007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Aerobik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 351028 Faksimile : 318970 Kode Pos : 30137
E-Mail : p3lbhps@yahoo.co.id Website : www.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ir. LUKITARIATI, M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ALEX NOERDIN**

Jabatan : **Gubernur Sumatera Selatan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 14-3-2016

PIHAK KEDUA

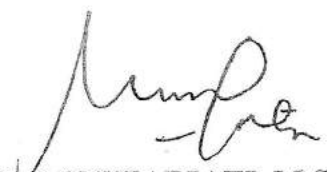
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


IR. LUKITARIATI, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196012171987032005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	58,99
2.	Menurunnya laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 sektor (Pertanian, Kehutanan & Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah).	2.600.380.141,50 tonCO ₂ eq
		Jumlah penurunan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah.	160.528 tonCO ₂ eq (13,01%)
3.	Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur serta para stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatnya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.	21.000 org
		Meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	100 % 1 Perda
4.	Laboratorium lingkungan yang terakreditasi, terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan udara.	Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan.	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan udara

No	PROGRAM	ANGGARAN	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.486.753.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.576.400.000	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	739.699.000	APBD
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	188.360.000	APBD
5	Komponen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1.296.111.000	APBN
6	Komponen Penegakan Hukum Lingkungan	229.659.000	APBN
7	Program Evaluasi dan Pelaporan	374.230.000	APBN

Palembang, 14 - 3 - 2016



KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

IR. LUKITARIATI, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196012171987032005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp: 0711-411007 Fax: 0711-411199 Kode Pos 30128
Email : bp3md@sumselprov.go.id, Website : www.bp3md.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Ruslan Bahri, MT
Jabatan : Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Alex Noerdin
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 14 - 3 - 2016

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PROMOSI DAN
PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. H. Ruslan Bahri, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 195710141986031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya investasi di Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pertumbuhan investasi PMA dan PMDN - Jumlah investor - Nilai realisasi investasi PMA - Nilai realisasi investasi PMDN 	<p style="text-align: center;">10%</p> <p>172 Perusahaan (PMA & PMDN)</p> <p style="text-align: center;">12,05 Triliun</p> <p style="text-align: center;">9,184 Triliun</p>
2.	Terciptanya pelayanan investasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kepuasan masyarakat atas Pelayanan Perizinan - Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan tepat waktu - Jangka waktu Perizinan dan Non Perizinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP 	<p style="text-align: center;">84</p> <p style="text-align: center;">80 %</p> <p style="text-align: center;">6 Hari</p>

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.286.150.000,-	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 113.636.400,-	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 51.500.000,-	APBD
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 753.226.000,-	APBD
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Rp. 630.715.600,-	APBD
6. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Rp. 660.878.000,-	APBN

Palembang, 14 - 3 - 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

KEPALA BADAN PROMOSI DAN
PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. H. Ruslan Bahri, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 195710141986031007



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan Kol. H. Barlian No. 82 KM 6 Palembang 30153
Telepon : (0711) 411903, 417790 Faksimile : (0711) 410488
Website : www.bkp.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Gunawan

Jabatan : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Alex Noerdin

Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 14 - 3 - 2016

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



TAUFIK GUNAWAN
Pembina Utama Muda
NIP.19640911 198803 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sasaran strategis 1	Indikator Kinerja 2	Target 3
1. Memantapkan ketersediaan pangan dengan Pola Pangan Harapan	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	80 Skor
2. Meningkatnya penanganan rawan pangan	- Penurunan Rawan Pangan 1 % per tahun	1% per tahun
3. Terlaksananya sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis	- Jenis Pangan Pokok Strategis yang didistribusikan kemasyarakat antar waktu antar wilayah untuk 11 komoditi - Harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkatkan produsen lebih besar atau sama dengan Harga Pokok Pemerintah	11 Komoditi ≥ HPP
4. Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	- Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi - Kandungan cemaran biologis, kimia dan fisik pangan segar buah dan sayur	91,46 Skor dibawah ambang batas uji lab

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 958.050.000,-	(APBD)
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp. 157.500.000,-	(APBD)
3. Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	: Rp. 93.720.000,-	(APBD)
4. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	: Rp. 712.800.000,-	(APBD)
5. Peningkatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	: Rp. 309.000.000,-	(APBD)
6. Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan	: Rp. 317.500.000,-	(APBD)
7. Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	: Rp. 378.690.000,-	(APBD)
8. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	: Rp. 14.493.311.000,-	(APBN)

Palembang, 14 - 3 - 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. ALEX NOERDIN

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


TAUFIK GUNAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640911 198803 1 014